

# PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PEDESAAN

H. Yuswar Zainul Basri

## Abstrak

Ketidak-berdayaan masyarakat pedesaan salah satunya akibat kebijakan yang *mismatch* di masa lalu, yaitu kebijakan yang melupakan sektor pertanian sebagai dasar keunggulan komparatif maupun kompetitif. Sehingga bukan hanya sektor pertanian saja yang terbengkalai, tetapi juga sektor modern yang dikembangkan menjadi kurang berhasil dan bahkan banyak yang tergantung bahan baku impor. Oleh sebab itu, sesungguhnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat pedesaan itu sendiri, tetapi juga membangun kekuatan ekonomi Indonesia berdasarkan pada keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimilikinya. Untuk itu dalam memberdayakan ekonomi masyarakat pedesaan perlu 3 (tiga) hal utama yang mesti dibenahi dengan baik.

**Kata kunci :** Ekonomi masyarakat, pedesaan.

Dalam awal tahun 2003 ini, masyarakat dikejutkan dengan adanya 3 (tiga) kenaikan tarif sekaligus yaitu BBM, listrik, dan telepon, yang akhirnya mengundang protes berbagai kalangan masyarakat, dan selanjutnya ditinjau kembali oleh Pemerintah dan DPR. Lalu bagaimana dengan masyarakat pedesaan yang selain rata-rata pendapatan lebih kecil dari masyarakat perkotaan, juga lapangan kerja yang amat sangat terbatas? Tentu saja kehidupan masyarakat pedesaan semakin terjepit. Melihat kenyataan itu maka diperlukan adanya solusi yang tepat agar masyarakat pedesaan dapat berdaya. Sebab jika ini tidak dilakukan akan membawa dampak pada semakin miskinnya penduduk pedesaan, menambah pengangguran, meningkatnya potensi kejahatan, dan tumbuh suburnya sektor informal di perkotaan. Dan ini akan menimbulkan masalah baru yang justru semakin ruwet.

---

H. Yuswar Zainul Basri,  
Dosen Senior FE, Universitas Trisakti  
& Perek II Universitas Trisakti,  
Jakarta

---

Berbicara masyarakat pedesaan maka berarti bicara soal mayoritas pekerjaan di pedesaan yaitu petani (Basri, Y. Z., 2000). Dan sebenarnya persoalan pendapatan yang rendah pada masyarakat pedesaan sudah lama terjadi baik pada masa orde baru, khususnya sejak revolusi hijau hingga saat ini. Karena revolusi hijau lebih memacu produktivitas, dengan melupakan penanganan pasca panen yang unggul dan jaringan pemasaran yang baik. Oleh sebab itu kini berdampak pada makin rusaknya tanah karena eksploitasi, nilai jual yang rendah yang berarti pendapatan petani menjadi tidak lebih baik karena jeleknya penanganan pasca panen dan tidak memadainya jaringan pemasaran hasil pertanian.

Mengapa masalah pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan begitu penting artinya bagi negara kita? Setidaknya ada 2 (dua) alasan penting, pertama, bahwa selama 32 tahun lebih masyarakat pedesaan relatif kurang diuntungkan secara ekonomi dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Padahal pedesaan dengan sektor pertanian sebagai motor penggerak utama menyerap tenaga kerja paling

besar dibandingkan sektor lainnya, namun nilai tukar masyarakat pedesaan – petani – yang diperoleh jauh lebih kecil dibandingkan sektor lainnya. Kedua, sejarah kebijakan menunjukkan sejak sekitar tahun 1970-an kisah sukses negara-negara industri baru (*New Industrialization Countries*) Asia Timur menjadi semacam model bagi penyesuaian struktur ekonomi. Sehingga banyak negara terobsesi untuk menjadi negara industri baru, seperti Indonesia, Malaysia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya. Namun kini baru kita sadari bahwa proses industrialisasi di Indonesia sesungguhnya kurang berpijak pada basis yang kuat karena tidak berlandaskan pada struktur dan kelembagaan sektor pertanian. Akibatnya sektor pertanian menjadi tertinggal dan pelakunya pun tidak mendapatkan *benefit* yang memadai dibandingkan pelaku di luar sektor pertanian.

Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pedesaan maka dapat dipandang gagal karena struktur kelenaga-kerjaan, misalnya, masih terbebaskan pada sektor pertanian karena proses transformasi yang sulit, meskipun sektor industri modern telah berkembang cukup jauh. Mengapa dapat terjadi? Hal ini karena pembangunan sektor industri tidak terkait erat dengan sektor pertanian, padahal sektor pertanian justru merupakan modal dasar bagi keunggulan daya saing. Oleh sebab itu daya pengaruh industrialisasi hingga saat ini masih sangat terbatas hanya di permukaan sistem ekonomi, dimana sektor modern di Indonesia menyerap tenaga kerja dalam kapasitas terbatas. Semua itu dapat dilihat hingga saat ini Indonesia belum memiliki daya

Tabel 1  
 Nilai Ekspor Indonesia menurut Sektor  
 2001 dan 2002

URAIAN	Nilai FOB (Milyar dolar AS)		% Perubahan	
	Jan - Nov 2001	Jan - Nov 2002	Jan - Nov 2002 thd 2001	thd Total Jan - Nov 2002
Total Ekspor	52,103.70	51,918.60	(6.07)	100.00
Migas	11,770.20	10,837.10	(7.93)	20.87
Non Migas	40,333.50	41,081.50	1.85	79.13
a. Pertanian	2,221.50	2,424.10	9.12	4.67
b. Industri	34,859.60	35,488.90	1.78	68.36
c. Pertambangan, dll	3,242.40	3,168.50	(2.28)	-6.10

Sumber : Kompas (2003)

saing ekspor yang tangguh. Selain itu gambaran mengenai betapa kecilnya pendapatan masyarakat pekerja pertanian — yang mayoritas ada di pedesaan — dapat dibandingkan antara tabel 1 dan tabel 2.

Walaupun tabel 1 dan 2 ini bukan merupakan indikator langsung terhadap kesejahteraan pelaku di sektor pertanian dan industri, namun setidaknya secara kasar dapat diketahui bahwa sektor pertanian yang digeluti oleh paling banyak pekerja (39.596.968 orang) dibandingkan dengan sektor lainnya — termasuk sektor industri — pendapatan ekspornya hanya sebesar US \$2.221,5.

Sementara sektor industri dengan pekerja yang relatif lebih sedikit memperoleh pendapatan ekspor sebesar US \$34.869,6 juta. Ketimpangan semacam ini jika tidak dicari jalan keluarnya akan menimbulkan masalah di masa mendatang. Persoalannya sekarang menjadi jelas bahwa pemberdayaan masyarakat di pedesaan perlu karena : (1) Sektor Pertanian menampung lapangan kerja paling besar dibandingkan dengan sektor lainnya belum diberdayakan secara optimal. (2) Mayoritas pelaku di sektor pertanian ada di pedesaan.

### Kegagalan Transformasi Pertanian menuju Industrialisasi dan Dampaknya terhadap Masyarakat Pedesaan

Keberhasilan negara berkembang, termasuk Indonesia, dicirikan oleh dualisme ekonomi dan teknologi antara sektor industri modern yang padat modal — yang umumnya di perkotaan — dan sektor pedesaan yang tradisional atau semi tradisional yang padat karya (Rachbini, 1996). Oleh sebab itu jika pembangunan ekonomi difartikan sebagai proses pengurangan jurang tingkat perkembangan ekonomi dan teknologi antara kedua sektor tersebut, maka strategi industrialisasi yang dikembangkan sejak masa Orde Baru malahan telah memperbesar dualisme ekonomi dan teknologi antara kedua sektor tersebut. Hal ini mengingat bahwa antara sektor pertanian yang dikembangkan dengan sektor industri yang padat modal kurang memiliki kaitan yang kuat. Sederhananya bahwa kita mampu memproduksi pesawat terbang namun impor dari beras hingga jeruk, mangga, dan hasil pertanian lainnya masih begitu besar hingga saat ini. Padahal kita memiliki potensi keunggulan komparatif. Oleh sebab itu pertanyaannya, mengapa kita tidak mengekspor hasil pertanian sebagaimana di alas? Karena sektor pertaniannya lepas kaitan dan

Tabel 2  
 Status Pekerjaan Utama dan Jenis Pekerjaan Utama  
 Tahun 2002  
 (> 15 Thn)

Status Pekerjaan	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
Usaha Sendiri	98,817	5,260	44,542	7,109,579	804,797	4,163,106	5,226,603	-	17,452,704
Usaha + Buruh Tdk Telap	24,927	8,606	26,598	3,598,222	226,389	14,891,107	1,550,224	-	20,326,073
Usaha + Buruh Telap	27,914	26,282	28,520	628,554	69,463	892,181	1,115,964	-	2,788,878
Pekerja/Buruh/Karyawan	2,993,203	194,783	4,123,409	2,009,871	2,959,557	2,712,125	11,191,448	394,604	26,579,000
Pekerja Bebas Pertanian	-	-	-	-	1,746	3,627,462	3,918	-	3,633,126
Pekerja Bebas Bukan Pertanian	38,460	-	9,296	112,592	206,002	-	2,072,685	-	2,439,035
Pekerja Tak Dibayar	22,886	355	27,048	2,602,842	151,029	13,310,987	1,471,454	-	17,586,601
<b>TOTAL</b>	<b>3,206,207</b>	<b>235,286</b>	<b>4,259,413</b>	<b>16,061,660</b>	<b>4,418,983</b>	<b>39,596,968</b>	<b>22,632,296</b>	<b>394,604</b>	<b>90,805,417</b>

Sumber : Diolah dari Data BPS (2002)

Catatan:

- |                                      |                                  |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 = Tng Profesional                  | 4 = Tng Penjualan                | 7 = Tng Usaha Industri & Sejenis |
| 2 = Tng Administratif & Kepemimpinan | 5 = Tng Usaha Jasa               | 8 = Tng Lain-lain                |
| 3 = Tng Tata Usaha & Sejenis         | 6 = Tng Usaha Pertanian & Sejeni |                                  |

hingga kini masih bersifat tradisional penanganannya. Dan lebih parah lagi dualisme pembangunan ekonomi dan teknologi ini dulu – ketika Orde Baru – sering diperbesar oleh kebijakan dan perlakuan preferensial – kemudahan pinjaman modal usaha, perijinan, dan lain - lain – kepada sektor modern, khususnya dalam hal akses sumber dana, seperti kredit maupun bentuk proteksi yang kini diantaranya menghasilkan kredit macet yang teramat sangat besar termasuk BLBI yang salah arah, yang dikemudian terbukti dengan besarnya kredit macet yang hingga kini masih ditangani oleh BPPN. Dari uraian di atas, maka bagi Indonesia, persoalan yang paling mendasar adalah bagaimana mendinamisasi sektor pertanian melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan. Ini perlu dilakukan karena melihat semakin meningkatnya kemiskinan akibat terbatasnya lapangan kerja. Kemiskinan adalah masalah besar yang merupakan tantangan terberat bangsa Indonesia sekarang ini. Dampaknya akan makin sulit ditanggulangi jika makin lama dilunda - tunda dan tidak memedulikan pemecahan secara mendasar. Kemiskinan makin merata dan parah ditambah dengan kesenjangan yang makin mencolok akan berdampak luas pada perilaku masyarakat, terutama lapis bawah. Sinisme makin berkembang, orang makin tidak memedulikan kepentingan orang lain, toleransi menghilang, mereka makin sensitif dan bertindak di luar kendali dan tega melakukan hal - hal yang sadis. Dengan makin memburuknya kondisi sosial ekonomi masyarakat lapis bawah – akibat kenaikan BBM, Telepon, Gas, TDL yang memiliki efek berganda sangat kuat terhadap kenaikan berbagai produk konsumsi di satu sisi, dan tidak adanya peningkatan pendapatan dan tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat di sisi yang lain – sekarang ini, maka masyarakat lapis bawah yang sudah tidak berdaya, kini makin tidak berdaya. Perjuangan atas hak ekonomi mereka sebagai warga negara tidak jelas jalurnya, tidak jelas siapa yang memperjuangkannya, dan tidak jelas dengan institusi apa mereka diperjuangkan. Melihat kenyataan yang

Tabel 3  
Proyeksi Angkatan Kerja di Indonesia Menggunakan Model Ranis, 1974 - 1999

Tahun	1974	1979	1984	1989	1994	1999	Pertumbuhan (%)
Angkatan kerja, Jt	40,0	45,2	51,2	57,9	65,5	74,2	2,5
AK Sektor Pertanian	25,0	25,8	26,3	25,3	23,7	21,4	
TK Pertanian tidak Berlebih	17,0	17,8	18,6	19,5	20,4	21,4	0,92
AK Sektor Industri	15,0	19,4	24,9	32,6	41,8	52,8	5,2
TK Industri yang Wajib	23,0	27,4	32,6	38,4	45,1	52,8	3,5
Faktor kelebihan	0,2	0,176	0,15	0,1	0,05	0,0	
TK Berlebihan	8,0	8,0	7,7	5,8	3,3	0,0	

Sumber : Glassbumer, Bruce dan Adityawan Chandra (1989)

demikian, maka pemberdayaan hanya bisa dilakukan dengan meningkatkan kepedulian pemerintah untuk mengangkat nasib mereka. Dan itu bukan sekedar dengan hibah, tetapi menciptakan kondisi agar mereka mampu berusaha secara mandiri (*selfreliant*), lepas dari ketergantungan.

Kenyataan membuktikan bahwa penyerapan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri yang terjadi tidak diikuti oleh tingkat penyerapan tenaga kerja yang memadai. Model Ranis (1985) tentang penyerapan tenaga kerja yang didasarkan pada asumsi bahwa transformasi ketenagakerjaan dari sektor pertanian menuju sektor industri merupakan suatu proses yang kontinum, ternyata menyimpang (*bias*) sekali.

Walaupun tabel 3 di atas mungkin sudah kadaluwarsa, namun memberikan gambaran bagaimana proyeksi yang dibuat pada waktu itu, kenyataannya jauh menyimpang dengan kenyataan yang terjadi saat ini. Penyimpangan yang cukup besar tersebut terjadi karena asumsi yang salah dalam hal ketersediaan tenaga kerja di Indonesia, yaitu asumsi bahwa pada tahap pematangan proses industrialisasi keadaan surplus tenaga kerja dengan sendirinya akan menuju pada keseimbangan penyerapan tenaga kerja dan bahkan bisa mencapai kondisi kekurangan tenaga kerja (*shortage of labor*) seperti yang dialami oleh Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan beberapa negara Asia Tenggara (Rachbini, 1996).

### Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan

Sesungguhnya pemberdayaan mengacu pada kata "*empowerment*" yang artinya upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki. Jadi, pendekatan pemberdayaan masyarakat pedesaan adalah penekanan pada pentingnya masyarakat pedesaan/lokal yang mandiri (*selfreliant communities*), sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri (Budhisantoso, 1999). Pendekatan pemberdayaan masyarakat pedesaan yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan hidup mereka.

Pendekatan pemberdayaan yang berpusat pada manusia (*people-centered development*) ini kemudian melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal (*community-based resources management*), yang merupakan mekanisme perencanaan *people-centered development* yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial (*social learning*) dan strategi perumusan program (Poggie and Polnac, 1991). Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat pedesaan dalam mengaktualisasikan dirinya (*empowerment*). Dalam kaitan ini, Poggie and Polnac (1991) mengemukakan cara - cara pendekatan pengelolaan usaha masyarakat, yang meliputi :

- a. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dibuat di tingkat lokal, oleh masyarakat yang memiliki identitas yang diakui peranannya sebagai partisipan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Fokus utama pengelolaan usaha kecil adalah memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam mengarahkan aset - aset yang ada dalam masyarakat setempat, untuk memenuhi kebutuhannya.
- c. Toleransi yang besar terhadap adanya variasi. Oleh karena itu mengakui makna pilihan individual, dan mengakui proses pengambilan keputusan yang desentralistis.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keberdayaan masyarakat pedesaan terletak pada proses pengambilan keputusan sendiri untuk mengembangkan pilihan - pilihan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai proses adaptasi masyarakat pedesaan terhadap lingkungannya merupakan informasi penting dalam pembangunan yang berorientasi pada manusia (*people centered development*), yang melandasi wawasan pengelolaan masyarakat pedesaan. Pentingnya memperhatikan aspek strategi adaptasi masyarakat lokal tersebut dalam kegiatan pemberdayaannya karena strategi adaptasi yang dikembangkan memungkinkan masyarakat mengatur daya tahan (*resilience*) terhadap persoalan - persoalan spesifik yang dihadapi, seperti : fluktuasi, ketidakpastian hasil, atau menurunnya pendapatan.

Akhirnya menjawab permasalahan alternatif pemberdayaan masyarakat pedesaan di Indonesia maka diperlukan adanya 3 (tiga) soko guru/hal utama, yaitu :

**Pertama**, hingga saat ini persoalan krusial di pedesaan selain terbatasnya lahan - khususnya pulau Jawa - adalah terbatasnya sumber dana. Kalau toh ada sumber dana, maka sumber dana yang tersedia terbatas dan amat mahal , itulah yang dikenal sebagai kredit informal - di desa tertentu sering disebut

#### *Pertanian masih menjadi andalan ekonomi desa*

sebagai *bank othok* atau *bank plecit* (karena dikejar - kejar/ditagih terus menerus), dan banyak sebutan lokal lainnya. Yang jelas realitasnya sebagaimana diketahui sumber dana yang ada di pedesaan selain kredit formal seperti bank dan pegadaian, ada pula kredit informal. Dan karena susahny mekanisme dan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh kredit, maka masyarakat pedesaan umumnya justru mengandalkan kredit informal. Kredit informal tersebut ada di dalam masyarakat - baik di perkotaan apalagi di pedesaan - namun tidak diatur oleh pemerintah. Pasar kredit usaha kecil informal biasanya bersifat *quasi monopolistic*. Di dalam pasar terdapat beberapa kreditur namun seorang debitur punya akses yang sangat terbatas. Ketergantungan seorang debitur terhadap kreditur sangat tinggi. Seorang kreditur hanya melayani sejumlah kecil peminjam yang sudah dikenal baik dan berisiko rendah. Sebagian besar pinjaman relatif kecil jumlahnya, berjangka waktu pendek, proses penyediaan sederhana, cepat, dan pemberian kredit tersebut lebih didasarkan pada unsur kepercayaan. Terjadinya pasar yang bersifat *quasi-monopolistic* dimungkinkan oleh kecenderungan setiap kreditur untuk membatasi jumlah nasabah yang dilayani dan berupaya menjaga portofolio pinjamannya sedemikian rupa, sehingga risiko tidak terbayarnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah dapat ditekan serendah

mungkin. Caranya antara lain dengan hanya memberikan kredit kepada orang - orang yang berkaitan dengan jaringan bisnisnya seperti sistem gadai surat tanah, buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), emas, atau dengan jaminan cek mundur, dan sebagainya. Dengan praktek tersebut, setiap kreditur dapat memelihara kesetiaan debiturnya. Suku bunga kredit dalam pasar informal sangat bervariasi. Menurut penelitian Robinson, suku bunga berkisar antara 2 sampai 10 kali dari tingkat bunga bank. Tingginya suku bunga tersebut disebabkan adanya *quasi-monopolistic many-lender credit market* (Robinson, S., 1996). Dengan kenyataan yang demikian maka dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan, campur tangan pemerintah sangat diperlukan guna mempermudah prosedur pinjaman melalui lembaga formal - seperti bank dan pegadaian - dalam jumlah tertentu. Ini penting sebab dengan cara demikian akan memperbesar pendapatan masyarakat di pedesaan. Karena selain dapat menampung pengangguran yang cukup besar, diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi pedesaan yang masih terasa lesu. Namun demikian, untuk pembiayaan dalam rangka pemberdayaan usaha kecil saat ini, peran perbankan mungkin masih sulit untuk diharapkan. Sebab kondisi perbankan nasional masih menghadapi permasalahan yang cukup berat, seperti masih besarnya jumlah *non performing loan*, belum membaiknya *net interest margin* dan kondisi permodalan, serta

kadang adanya kesulitan likuiditas yang masih berlangsung hingga saat ini. Dengan kinerja perbankan yang demikian, tentunya menjadi kendala bagi penyaluran kredit. Jika demikian, maka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya usaha kecil masyarakat pedesaan, diperlukan peran lembaga keuangan lain yang dapat berperan sebagai *complementary institutions* dari perbankan. Dan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang sudah lama dikenal adalah Perum Pegadaian. Berkaitan dengan masalah pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan, maka keberadaan Perum Pegadaian dalam kondisi ekonomi seperti saat ini sesungguhnya memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan yang lain, dalam menopang pembiayaan, diantaranya : (1) Selain membantu pembiayaan usaha kecil masyarakat pedesaan, Perum Pegadaian juga merupakan salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan pembiayaan bagi sebagian masyarakat kecil/miskin yang memerlukan; (2) Perum Pegadaian memiliki prosedur yang sederhana, mudah, dan cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya; dan (3) Perum Pegadaian memiliki jaringan kantor dan wilayah kerja yang menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia. Persoalannya kemudian, bagaimana mensintesa (menggabungkan) antara usaha kecil masyarakat pedesaan yang tersebar di semua wilayah Indonesia dengan Perum Pegadaian, sehingga dapat memberdayakan masyarakat pedesaan yang lebih baik? Untuk itu dapat dilakukan dengan cara : (1) Sistem manajemen pendanaan yang sentralistik seperti diterapkan Perum Pegadaian saat ini dieliminir. Sebab dengan pendanaan yang sentralistik justru akan menghambat perkembangan Perum Pegadaian terutama pada saat terjadinya kekurangan likuiditas. Padahal jika Perum Pegadaian di daerah diberi keleluasaan justru akan memiliki potensi untuk menghimpun dana sendiri yang berasal dari potensi wilayah pedesaan setempat. Sebab hal yang sering dilupakan bahwa sesungguhnya usaha kecil termasuk di dalamnya

masyarakat pedesaan juga mampu menabung. (2) Lebih diarahkan pada tujuan pemenuhan kebutuhan yang produktif ketimbang pada kebutuhan konsumtif. Penggunaan yang bersifat produktif misalnya modal kerja pada berbagai usaha kecil seperti penanganan pasca panen petani yang lebih baik, usaha yang bersifat pesanan, perajin, *catering*, pembayaran upah karyawan, dan lain sebagainya. Walaupun demikian bukan berarti porsi untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif bagi masyarakat pedesaan dihilangkan sama sekali.

Kedua, kebijakan pertanian yang hingga kini terlalu terfokus pada produksi dan kurang memanfaatkan efek ekonomi berantai pada usaha pertanian — khususnya jaringan pemasaran petani pada produk hasil pertaniannya —, harus ditinggalkan. Semua itu agar petani dapat memperoleh pendapatan yang cukup. Untuk itu pertanian hendaknya berada dalam satu sistem, tidak dipisah-pisah seperti selama ini. Sebab program pertanian selama ini hanya terfokus pada peningkatan produksi dengan kelemahan jika produksi turun berakibat kekurangan pangan, sebagaimana yang terjadi pada tahun 1998 dan jika produksi berlebih tidak mampu mengatasi masalah penanganannya, seperti yang biasa terjadi saat panen raya beras maupun produk pertanian lainnya. Untuk menghindari masalah tersebut, pertanian harus dikembangkan secara terintegrasi, namun spesifik daerah dan tidak sentralistik seperti sekarang ini. Dengan demikian, dapat dikembangkan kelebihan potensi daerah. Pertanian harus dipandang sebagai suatu sistem usaha, yang terdiri dari berbagai jenis usaha yang langsung terkait dengan produksi komoditas pertanian. Artinya mulai dari sarana produksi pertanian hingga industri pengolahan hasil dan usaha pemasaran maupun pembinaan konsumsinya terintegrasi. Istilah Menteri Pertanian saat ini menyatukan agribisnis dan agroindustri dalam satu sistem.

Bagaimana realisasinya? Pertanian harus dipandang sebagai suatu sistem usaha, yang terdiri dari berbagai jenis usaha yang langsung terkait dengan

produksi komoditas pertanian. Berbagai jenis usaha itu harus saling sinambung, meliputi : (1) usaha penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; (2) usaha proses produksi (budidaya) pertanian; (3) industri pengolahan hasil; (4) usaha pemasaran (termasuk usaha transportasi/distribusi) dan usaha pembinaan konsumsinya.

Dalam kaitannya dengan produksi pangan, hendaknya dikembangkan, dengan basis daerah, segala jenis bahan pangan yang telah biasa dan yang potensial diproduksi menurut daerahnya. Semua jenis komoditas pangan itu dapat dihasilkan dari berbagai sumber : tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, bahkan potensi produksi pangan dari kehutanan atau sumber alam lainnya.

Di tingkat petani, proses produksi pertanian dapat diusahakan secara *mix farming* dalam satu lahan, dengan mengkombinasikan beberapa sumber pangan itu secara optimum dan efisien. Sementara itu, usaha-usaha lain yang terkait dikembangkan menjadi usaha industri dan perdagangan, yang memperluas lapangan kerja baru di wilayah pedesaan. Masing-masing jenis komoditas pangan itu apabila ada kelebihan produksi dapat diindustrikan atau dipasarkan ke daerah lain atau bahkan diekspor. Perolehan uangnya digunakan untuk pengadaan jenis bahan pangan lain yang tidak diproduksi di daerahnya.

Jika di tiap daerah di Indonesia seluruh potensi pertanian (pangan dan non pangan) diusahakan dengan cara demikian maka bukan hanya masyarakat miskin akan semakin jauh berkurang, tetapi juga kecukupan pangan, dan bahkan juga peningkatan kegiatan ekonomi, perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan.

Ketiga, masalah pendidikan di Indonesia merupakan masalah yang hingga saat ini dapat dikatakan belum siap pakai. Jika sementara ini belum siap pakai diartikan sebagai tidak siap dikonsumsi oleh sektor industri, maka sesungguhnya *out-put* pendidikan juga tidak siap dikonsumsi oleh sektor pertanian

dan berbagai usaha kecil lainnya di pedesaan. Oleh sebab itu pendidikan yang ada di Indonesia sesungguhnya ada di simpang jalan. Gambaran ini semakin nampak jika dilihat bahwa kecenderungan anak-anak masyarakat pedesaan atau anak petani untuk tinggal di daerahnya untuk mengembangkan daerahnya atau menjadi petani hampir tidak ada. Semua ini bersumber dari pembekalan pendidikan yang salah. Ada pepatah mengatakan: "tak kenal maka tak sayang". Dalam konteks ini berarti bahwa pendidikan SD hingga SLTA dan bahkan Perguruan Tinggi di suatu daerah belum memiliki kurikulum yang mencirikan keunggulannya berdasarkan potensi daerah dimana sekolah itu berada. Sehingga jadilah anak didik "tak kenal maka tak sayang". Yang kita lihat bahwa hingga saat ini di berbagai daerah, penyelenggara pendidikan di tingkat SLTP hingga SMU masih lebih percaya dengan pembekalan anak didiknya dengan komputer ketimbang keunggulan potensi daerah dimana penyelenggaraan pendidikan dilakukan. Sehingga anak didik menjadi terasing terhadap daerahnya sendiri. Apakah ini bukan kesalahan fatal? Mengapa justru tidak dikembangkan keunggulan pendidikan SLTP dan SLTA yang mengacu pada daerahnya. Misalnya jika mencari lulusan setingkat sekolah menengah yang ahli soal penangkapan ikan laut maka dengan mudah dicari lulusan dari daerah A, misalnya. Sedang jika ingin mencari lulusan SLTA yang memiliki keahlian produk makanan berbahan baku *gaplek* atau sugu maka dapat dicari lulusan dari daerah B dan C, misalnya. Ini yang mestinya dikembangkan. Bukan komputer dan *high technology* yang tidak ada manfaat langsung bagi SDM di daerah pedesaan. Apakah sudah sangat diperlukan keberadaan komputer dan produk canggih lainnya di pedesaan atau di kota-kota kecil di Indonesia? Saya pikir masih sangat minimal. Begitu pula perguruan tinggi yang membabi buta dengan memberikan *textbook* luar negeri tetapi sesungguhnya realitas kerja yang ada belum membutuhkan. Kenyataan ini mengacu pada disertasi saya, saya pun kesulitan mendefinisikan usaha kecil antara di negara maju

dengan di Indonesia, karena syarat modalnya yang begitu jauh. Dan perbedaan modal yang begitu jauh pasti membawa banyak implikasi yang berbeda. Oleh sebab itu wajar jika banyak sarjana yang menjadi pengangguran, karena *mismatch* baik dengan sektor modern maupun sektor tradisional. Sebagai contoh sederhana, apa untungnya mahasiswa diberikan *corporate finance*? Apakah daya tampung lapangan kerja korporasi atau perusahaan besar atau TNC atau MNC begitu besar? Jika ya mengapa banyak pengangguran, jika tidak mengapa tidak *warteg finance* atau *padang finance*? Selidik-tidaknya lulusan bisa berdikari. Hal yang perlu diingat bahwa setiap kita meng-absorpsi ilmu pengetahuan pasti ada *social and culture bias* di dalamnya, oleh sebab itu hendaknya selain *adjustment* juga kesesuaian dengan kebutuhan riil masyarakat di sekitarnya.

#### Kesimpulan dan Saran

Dari keseluruhan uraian artikel dapat dimengerti bahwa ketidak-berdayaan masyarakat pedesaan salah satunya akibat kebijakan yang *mismatch* di masa lalu, yaitu kebijakan yang melupakan sektor pertanian sebagai dasar keunggulan komparatif maupun kompetitif. Sehingga bukan hanya sektor pertanian saja yang terbengkelai, tetapi juga sektor

modern yang dikembangkan menjadi kurang berhasil dan bahkan banyak yang tergantung bahan baku impor. Oleh sebab itu, sesungguhnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat pedesaan itu sendiri, tetapi juga membangun kekuatan ekonomi Indonesia berdasarkan pada keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimilikinya. Untuk itu dalam memberdayakan ekonomi masyarakat pedesaan perlu 3 (tiga) hal utama yang mesti dibenahi dengan baik, yaitu :

#### 1. Sistem Pembiayaan

Persoalan krusial di pedesaan selain terbatasnya lahan – khususnya pulau Jawa – adalah terbatasnya sumber dana. Kalau toh ada sumber dana, maka sumber dana yang tersedia terbatas dan amat mahal. Dengan kenyataan yang demikian maka dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan campur tangan pemerintah sangat diperlukan guna mempermudah prosedur pinjaman melalui lembaga formal dalam jumlah tertentu. Ini penting sebab dengan cara demikian akan memperbesar pendapatan masyarakat di pedesaan.

Selanjutnya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, maka keberadaan Perum Pegadaian dalam kondisi ekonomi seperti saat ini sesungguhnya memiliki beberapa



Peternakan masih membutuhkan permodalan

keunggulan dibandingkan dengan pembiayaan yang lain, karena: (1) Selain membantu pembiayaan usaha kecil masyarakat pedesaan, Perum Pegadaian juga merupakan salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan pembiayaan bagi sebagian masyarakat kecil/miskin yang memerlukan; (2) Perum Pegadaian memiliki prosedur yang sederhana, mudah, dan cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya; dan (3) Perum Pegadaian memiliki jaringan kantor dan wilayah kerja yang menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia.

Hanya disarankan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan ini, Perum Pegadaian membenahi: (1) Sistem manajemen pendanaan yang sentralistik seperti diterapkan Perum Pegadaian saat ini dapat dihilangkan. Sebab dengan pendanaan yang sentralistik justru akan menghambat perkembangan Perum Pegadaian terutama pada saat terjadinya kekurangan likuiditas. Padahal jika Perum Pegadaian di daerah diberi keleluasaan justru akan memiliki potensi untuk menghimpun dana sendiri yang berasal dari potensi wilayah pedesaan setempat. Sebab hal yang sering dilupakan bahwa sesungguhnya usaha kecil termasuk di dalamnya masyarakat pedesaan juga mampu menabung. (2) Lebih diarahkan pada tujuan pemenuhan kebutuhan yang produktif ketimbang pada kebutuhan konsumtif. Penggunaan yang bersifat produktif misalnya modal kerja pada berbagai usaha kecil seperti penanganan pasca panen petani yang lebih baik, usaha yang bersifat pesanan, perajin, *catering*, pembayaran upah karyawan, dan lain sebagainya.

## 2. Sistem Pertanian

Pertanian yang selama ini hanya terfokus pada peningkatan produksi mesti segera ditinggalkan. Pertanian harus dikembangkan secara terintegrasi, dimana pertanian harus dipandang sebagai suatu sistem usaha, yang terdiri dari berbagai jenis usaha yang langsung terkait dengan produksi komoditas pertanian.

Untuk itu Pemerintah Daerah dalam

kaitannya dengan produksi pangan dapat mengembangkan komoditas pertanian dengan basis daerah, segala jenis bahan pangan yang telah biasa dan yang potensial diproduksi menurut daerahnya. Sedang bagi petani di daerah maka proses produksi pertanian dapat diusahakan secara *mix farming* dalam satu lahan, dengan mengkombinasikan beberapa sumber pangan itu secara optimum dan efisien. Sementara itu, usaha-usaha lain yang terkait dikembangkan menjadi usaha industri dan perdagangan, yang memperluas lapangan kerja baru di wilayah pedesaan.

## 3. Sistem Pendidikan

Pendidikan saat ini bukan hanya tidak siap pakai bagi sektor modern saja, tetapi juga bagi sektor tradisional maupun sektor informal sekalipun.

*Mismatch* dengan sektor tradisional, setidaknya ditandai dengan pendidikan SD hingga SLTA dan bahkan Perguruan Tinggi di suatu daerah belum memiliki kurikulum yang mencirikan keunggulannya berdasarkan potensi daerah dimana sekolah itu berada. Sehingga anak didik menjadi terasing terhadap daerah dimana mereka sekolah. Padahal jika mengacu pada daerahnya maka dengan mudah sebuah perusahaan atau usaha baru mencari tenaga kerja. Misalnya jika mencari lulusan selingkat sekolah menengah yang ahli soal penangkapan ikan laut maka dengan mudah dicari lulusan dari daerah A, misalnya. Sedang jika ingin mencari lulusan SLTA yang memiliki keahlian produk makanan berbahan baku *gaplek* atau sagu maka dapat dicari lulusan dari daerah B atau C, misalnya. Ini yang mestinya dikembangkan. Jika demikian, maka pendidikan yang ada akan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan di daerahnya, sebab sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di sekitarnya.

Sedang tidak *link* dan *match* dengan sektor informal karena mungkin akibat ketidak-lahuan kita akan sektor informal sebagai lapangan kerja. Ambil contoh, pekerjaan pemulung yang sementara ini dianggap kotor, tidak dapat diremehkan sebagai salah satu lapangan kerja.

Pendapatan minimal mereka di atas buruh pabrik atau pekerja bengkel/montir dan maksimal bahkan lebih besar dari gaji karyawan bank dengan pendidikan D-III atau S-1 pemula. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika pemulung tidak suka berjudi, tidak suka makan enak (berhemat), dan bekerja dengan manajemen yang betul kadang dapat menjadi pengusaha dengan aset ratusan juta hingga milyaran sebagaimana pernah dimuat di suatu surat kabar ibukota. Namun anehnya, kenapa banyak pendidikan terkait tidak memberi muatan manajemen bisnis limbah RT yang potensial memberi penghasilan bagi anak didik kelimbang manajemen bisnis MNC? Inilah salah satu sumber *mismatch* pendidikan dengan lapangan kerja sektor informal yang tersedia. **□**

## Daftar Pustaka

- Anonim. *Statistik Keadaan Pekerja/Karyawan di Indonesia*. Jakarta: BPS, 2002.
- Basri, Y. Z. *Dampak Pemberdayaan melalui Pembangunan Berkesinambungan terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Tani Tanaman Pangan di Jawa, Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2000.
- Basri, Y. Z. *Pengaruh Pengajaran S-1 Akuntansi Trisakti terhadap Kesenjangan Lulusannya dengan Dunia Usaha di JaBoTaBek*. Disertasi. Jakarta: Universitas Trisakti, 1996.
- Budhisantoso, S. "Komuniti Lokal di Kawasan Pesisir dan Pemberdayaannya". *Makalah Lokakarya Pembangunan Pranata Sosial Komunitas Pesisir*. Jakarta: UI, 1999.
- Glassbumer, Bruce and Chandra, A. *ASEAN's Other Four: Economic Policy and Economic Performance Since 1970*. (fotocopy), 1989.
- Koentjoro-Jakti, D. (ed). *Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986.
- Lewis, A. *Economic Development with Unlimited Supplies of Labor*. Manchester School, 1974.
- Mehmet, Ozay. "Rent-Seeking and Gate-Keeping in Indonesia". *Labour, Capital and Society*, 2/1, April, 1994, p. 83.
- Mishra, R. P. et. al., 1981. *Regional Development in India: A New Strategy*. New Delhi: Vikas.
- Poggie, J. J. and Polnac, B. R. *Small-scale Fishery Development: Sociocultural Perspectives*. Kingston, ICMRD - The University of Rhode Island.
- Rachbini, D.J. *Politik Deregulasi dan Agenda Kebijakan Ekonomi*. Jakarta: InfoBank, 1996.
- Ranis, G. "The Dual Economy Framework: Relevance on Asian Development". *Asian Development Review*, No.1. Vol. II, ADB, Manila, 1985.
- Robinson, Marguerite S. *Rural Finance Intermediation: Lessons From Indonesia Part One The Bank Rakyat Indonesia: Rural Banking, 1970 - 91*. Harvard University: Harvard Institute for International Development, 1992.